

**PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA JAYA
KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu
Administrasi Negara*



Oleh :

SIJAINUARI
NPM. 200411012

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2024**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA
JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA : SIJAINUARI
NPM : 200411012
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



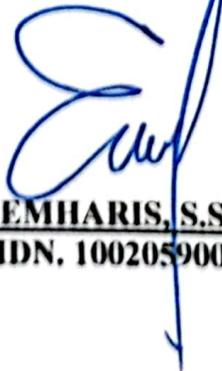
EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

TANDA PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :

Hari : Rabu

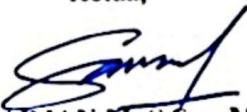
Tanggal : 11

Bulan : September

Tahun : 2024

TIM PENGUJI

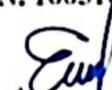
Ketua,


SARJAN.M, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1008128002

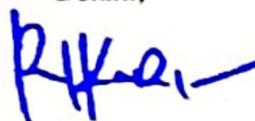
Sekretaris,


ALSAR ANDRI, S.Sos, M.Si
NIDN. 1005108901

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos.,M.Si
2. DESRIADI, S.Sos.,M.Si
3. SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si

()
()
()

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

**PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA JAYA KOPAH
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

ABSTRAK

Oleh :

**SIJAINUARI
NPM : 200411012**

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan *Good Governance* di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Good Governance* atau pemerintahan yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggung jawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang di capai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintahan dalam suatu negara. Teknik penarikan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian , dimana pengambilan sampel dari orang-orang yang dipilih oleh penulis dengan informan sebanyak 16 orang. Setelah penulis turun kelapangan secara langsung dan melakukan wawancara dengan informan yang telah penulis pilih tersebut maka hasil yang penulis dapat tentang pelaksanaan *Good Governance* di desa jaya kopah sudah berjalan dengan cukup baik.

Kata Kunci : *Good Governance*, Pemerintahan

**IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN JAYA KOPAH
VILLAGE KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRACT

By :

**SIJAINUARI
NPM : 200411014**

This research was carried out in Jaya Kopah Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The aim of this research is to find out how well Good Governance is implemented in Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. Good governance or good governance is basically a concept that refers to the process of achieving decisions and their implementation that can be held accountable together as a consensus reached by the government, citizens and the private sector for government administrators in a country. The sampling technique used by the author in this research is purposive sampling, namely a sampling method that is chosen carefully so that it is relevant to the research structure, where samples are taken from people selected by the author with 16 informants. After the author went directly to the field and conducted interviews with the informants that the author had chosen, the results that the author got regarding the implementation of Good Governance in Jaya Kopah village were going quite well.

Keywords : *Good Governance, Government.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya mengartikan *good governance* dengan pemerintahan yang bersih, atau *clean government*. *good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan. Pada dasarnya, penerapan tata pemerintahan yang baik merupakan pelayan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengatakan

bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan Good Governance demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, Proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Good Governance” sering di artikan sebagai “Kepemerintahan yang baik”. Adapula yang mengartikannya sebagai “tata pemerintahan yang baik” dan ada pula yang mengartikannya sebagai “sistem pemerintahan yang baik”. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah “governance” sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik good and services.

Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian sebagai berikut. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik *good governance* adalah landasan setiap negara yang demokratis dalam mengelola pemerintahannya. Pemerintahan yang baik bertujuan untuk membentuk kesejahteraan masyarakat serta mencapai tujuan dan cita cita dari negara itu sendiri. Adanya pergeseran paradigma dari

government ke *governance*, Muncul pandangan atau paradigma baru tentang administrasi yang disebut *good governance*. Diperlukan adanya kesetaraan dan kerjasama yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil Hal tersebut karena *good governance* berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki dua sisi yakni masyarakat untuk partisipasinya dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan dan untuk aspek negara/pemerintahan, yang meliputi transparansi, daya tanggap dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dilihat dari aspek yang dijelaskan dalam demokrasi tersebut, ternyata masuk dalam pembahasan *good governance*. Negara yang demokratis sangat memerlukan *good governance*. Oleh karena itu, perlu bermitra dengan masyarakat melalui lembaga pemerintah untuk memungkinkan (masyarakat dan negara) untuk saling mengontrol.

Konsep *good governance* ini muncul dikarenakan karena kurang efektifnya kinerja di dalam pemerintah selama ini sangat dipercaya oleh masyarakat sebagai penyelenggara urusan publik yang bersifat terpusat hingga pada daerah bahkan tidak berpartisipasi dan tidak menumbuhkan rasa percaya di mata masyarakat dan antipati pada rezim yang berkuasa. Hampir di setiap peristiwa sangat penting yaitu membahas masalah pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Jaya diharapkan menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, karena *good governance* ini merupakan perwujudan rill, masyarakat seperti ini akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintahan. Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya guna dihadapan pemerintah dan masih

banyak masalah sosial seperti konflik dan anarkisme kelompok, maka sangat kecil kemungkinan *good governance* itu ditegakkan.

Sejak era reformasi hingga saat ini tugas serta tanggung jawab pemerintah semakin meningkat seiring dengan tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan baik. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menerapkan pemerintahan yang baik atau *good governance* untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di Indonesia. *good governance*, diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Salah satu cara untuk mengembangkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni dengan meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemerintahan setempat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Jaminan Kepala Daerah Berinovasi Pasal 1 Ayat 1 bahwa setiap instansi pemerintah dapat melakukan pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya proses *good governance* yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah dan masyarakat. Salah satu pilihan strategis

untuk menerapkan *good governance* yakni melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas didasarkan pada akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan melalui petugas layanan dengan mengedepankan efektivitas pada pencapaian yang menjadi tujuan dan sasaran, sederhana dalam prosedur dan tata cara pelayanan yang mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat (pengguna layanan), perlunya kejelasan dan kepastian (transparansi) mengenai persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, maupun jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

Instansi pemerintah daerah seperti kecamatan atau desa merupakan salah satu contoh instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Desa sebagai penyedia layanan publik yang dapat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik *good governance* dalam peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk jasa atau perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul : **“Pelaksanaan *Good Governance* Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Pelaksanaan *Good Governance* Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dimaksud adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *good governance* di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *good governance* mengenai pelayanan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi terhadap upaya pemerintah dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4.2.2 Sebagai masukan untuk mengetahui faktor penghambat terlaksananya *good governance*.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan tersebut maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan *Good Governance* Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik Meskipun didalam setiap pemerintahan selalu memiliki kekurangan dan kelebihan yang terdapat di dalam sebuah instansi atau lembaga pemerintahan tetapi peneliti menilai pelaksanaan *Good Governance* di desa jaya kopah sudah berjalan dengan cukup baik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan *Good Governance* Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintahan Desa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi masyarakat khususnya desa jaya kopah.
2. Diharapkan kepada pemerintahan desa jaya agar lebih sering lagi untuk sosialisasi agar partisipasi masyarakat lebih tumbuh lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Dwiyanto, 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University press.
- Ahmad Mustanir, 2023. *Dasar Ilmu Pemerintahan*. Sumatera Barat. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Alemina Henuk Kacaribu. 2020. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.
- Andi Nuraini. 2022. *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandung. Media Sains Indonesia.
- Arie Ambarwati. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang. Media Nusa Creative.
- Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.
- Basuki Johannes. 2018. *Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Budi Nugraha. 2022. *Teori Administrasi*. Padang. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Faizal achmad ramadhan, 2020. *Peran pemerintah desa dalam mewujudkan good governance studi kasus desa haurpanggung kecamatan tarogong kidul kabupaten garut*. Skripsi. Universitas siliwangi.
- Fenti Hikmawati. 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Haruni Ode. 2019. *Pengembangan Organisasi Berbasis Spiritual*. Surabaya. CV Jakad Publishing.
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Ibrahim Azharsyah. 2021. *Metodelogi penelitian ekonomi dan bisnis dalam islam*. PT Naskah Aceh Nusantara.
- Irmayani, Ni Wayan Dian. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Budi Utama.
- Juharni. 2015. *Penghantar Ilmu Administrasi Negara*. Makassar. CV SAH MEDIA.
- Mariati Rahman. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makassar. CV SAH MEDIA.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi. Unimal Press.
- Muhammad Fadli Efendi. 2022. *Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Monitoring*

- Pelaksanaan Hibah Daerah Pada Sektor Pembangunan*). Jawa Barat. Guepedia.
- Nugraha, Budi dkk. 2022. *Teori Administrasi*. Padang. Pt Global Eksekutif Teknologi Redaksi
- Nurchotimah Imam Sholichan Aulia. 2021. *Pengawasan Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Jejak Pustaka.
- Pasalong Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Purnaya Ketut Gusti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. . Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Rahyunir Rauf dan Sri maulidiah, 2015. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta. Zanafa Publishing
- Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya. Cipta Media Nusantara.
- Riinawati. 2019. *Pengantar Manajemen Komunikasi dan Organisasi*. Banjarmasin. Pustaka Baru Pres.
- Robbins, Stephen P dkk. 2019. *Perilaku Organisasi*. Jakarta Selatan. Selemba empat.
- Rohman, Adb. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Malang. Wisma Kalimetro.
- Saihudin. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ponogoro. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sandu Siyoto & Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Literasi Media Publishing.
- Sapri, dkk. 2020. *Pelayanan Publik Implementasi dan Aktualisasi*. Jawa Timur. CV Penerbit Qiara Media.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suprihanto, Jhon. 2014. *Manajemen*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Syafiie, InuKencana. 2019. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta. BumiAksara.
- Toman Sony Tambunan, 2016. *Glosarium istilah pemerintahan*. Jakarta. PRENADAMEDIA GROUP
- Torang, Syamsir. 2016. *Organisasi Dan Manajemen*. Bandung. Alfabeta.

- Triningtyas, Diana Ariswanti. 2017. *Survey Permasalahan Bimbingan dan Konseling*. Jawa Timur. Cv, Ae Media Grafika.
- Ulum Chazienul . 2018. *Public Sevice Tinjauan Teoritis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. Malang. Ub Press.
- Umar Congge . 2017. *Patologi Administrasi Negara*. Makassar. CV SAH MEDIA.
- Wayan, D. I. 2022. *Manajmen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Cv Budi Utama.
- Wisnu, Dicky. 2019. *Teori Organisasi Struktur dan Desain*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.

B. JURNAL

- Hanafi dan Rohman. (2019). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *REFORMASI. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online).*, Volume 9 Nomor2.
- Jamaluddin dkk, 2022. Analisis hubungan kinerja pemerintahan desa dengan badan permusyawaratan desa menurut pasal 23 dan pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *jurnal pendidikan islam: pendekatan interdisipliner*, vol 6, no 1 Junior, M. P. 2016. *Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Perizinan Penanaman Modal Di BPPT Kota Semarang)*. 10.
- Nasution. 2018. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara Vol. 10, No. 2 Januari 2018, 72-77* .
- Wilman Juniardi. 2022. *Penyajian Data Lengkap dengan Macam dan Jenisnya*. Jurnal Quipper.

C. UNDANG -UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah,

Jaminan Kepala Daerah Berinovasi Pasal 1 Ayat 1

**Undang–undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang peraturan BPK

D. SUMBER LAINNYA

Buku panduan skripsi Universitas Islam Kuantan Singingi